

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Tegal Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen Renja SATPOL PP Kota Tegal merupakan tindak lanjut amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan diatur secara rinci pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Melalui Rancangan Rencana Kerja ini ditetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pada Tahun 2026. Dengan demikian, Rancangan Rencana Kerja ini dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SATPOL PP Kota Tegal untuk 1 (satu) tahun kedepan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tegal Tahun 2025-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) SATPOL PP Kota Tegal Tahun 2025 - 2026 yang pada hakikatnya merupakan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.

Demikian Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Tegal Tahun 2026 disusun untuk dapat dilaksanakan secara akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kinerja perencanaan pembangunan Kota Tegal.

Tegal, 30 Juli 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Tegal



[Signature]
Hartono, S.Ipem, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19690115 199009 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	16
1.3 Maksud dan Tujuan	17
1.4 Sistematika	17
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	21
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	21
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah	29
2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD	30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	47
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	48
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi	48
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	49
3.3 Program dan Kegiatan	49
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	50
BAB V PENUTUP	64

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Dalam kerangka legislasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur dan mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. RKPD tersebut kemudian di breakdown ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Selanjutnya Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.

Pada prinsipnya sebuah kebijakan menjadi relevan dan dapat dipedomani bagi suatu daerah karena beberapa karakteristik :

- a. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu.
- b. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut.
- c. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud.

Dalam praktiknya, sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat dari program dan kegiatan yang diagendakan pada tahun 2026, yang secara implisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun rencana maupun jabaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung rencana pembangunan suatu daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Tegal khususnya dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakkan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat. Selanjutnya dalam rangka mendorong terciptanya situasi yang kondusif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, perlu ditunjang dengan peningkatan sistem pertahanan, keamanan dan ketertiban dengan kebijakan yang diarahkan kepada peningkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Guna mendukung pelaksanaan hal tersebut maka perlu menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang akan digunakan sebagai pedoman / arahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menunjang pelaksanaan pembangunan Kota Tegal.

Pembentukan Satpol PP dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2022 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota Tegal sedangkan Susunan Organisasi, tugas dan fungsi Satpol PP diatur dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 51 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata

Kerja Dinas Daerah Kota Tegal. Dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Tegal Nomor 51 Tahun 2021 dinyatakan bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran, dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda”. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Walikota Tegal Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perwal Kota Tegal Nomor 51 Tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran
- d. Pembinaan dan fasilitasi di bidang ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran
- e. Pemantauan
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
- g. Pengendalian administrasi kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Tegal Nomor 51 Tahun 2021 terdiri dari :

1. Kepala Satuan;

Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal

2. Sekretariat, terdiri dari :

- a) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- b) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari:

- a) Subbidang Operasi dan Pengamanan;
- b) Subbidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat.

4. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari :

- a) Subbidang Penindakan;
- b) Subbidang Pengawasan dan Pembinaan.

5. Bidang Penyelamatan dan Pencegahan Kebakaran, terdiri dari :

- a) Subbidang Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi.
- b) Subbidang Inspeksi dan Pemberdayaan Masyarakat

6. UPTD;

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretariat

- Tugas: Sekretariat Satpol PP mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan serta umum dan kepegawaian di lingkungan Satpol PP.
- Fungsi :
 - a. Pengoordinasian penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran di lingkungan Satpol PP;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan serta umum dan kepegawaian di lingkungan Satpol PP;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Satpol PP;
 - d. pengoordinasian pengelolaan keuangan di lingkungan Satpol PP;
 - e. pengoordinasian pengelolaan ketatausahaan,perlengkapan, rumah tangga dan aset di lingkungan Satpol PP;
 - f. pengoordinasian penata kelolaan organisasi, tata laksana dan pelayanan publik di lingkungan Satpol PP;
 - g. pengoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Satpol PP;
 - h. pengoordinasian penyusunan konsep kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Satpol PP;
 - i. pengoordinasian penyusunan evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara di lingkungan Satpol PP;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi serta dokumentasi di lingkungan Satpol PP;
 - k. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Satpol PP;
 - l. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Satpol PP;
 - m. pengoordinasian penyusunan laporan capaian kinerja di lingkungan Satpol PP;
 - n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kesekretariatan Satpol PP; dan

- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahkan :

a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Tugas :Penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, meliputi : perencanaan dan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran; menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis; menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan keuangan; menyiapkan kegiatan pengelolaan data dan informasi terkait program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan, kegiatan penatausahaan keuangan, menyiapkan bahan penataan organisasi; menyiapkan bahan pegoordinasian pelaksanaan evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran; menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan penyusunan laporan capaian kinerja dan melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya.

b. Sub Bagian Umum dan kepegawaian

Tugas : Penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, meliputi : bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis ketatausahaan dan kepegawaian; menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan ketatausahaan dan kepegawaian; menyiapkan kegiatan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kearsipan, kepustakaan dan bahan kerjasama; menyiapkan kegiatan pengelolaan rumah tangga meliputi peralatan, perlengkapan serta logistik kantor ; menyiapkan kegiatan pengelolaan barang milik daerah; menyiapkan kegiatan pengelolaan tatalaksana dan pelayanan publik; menyiapkan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian; menyiapkan bahan pelaksanaan advokasi hukum, humas dan protocol; menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja; menyiapkan bahan penyusunan

evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan ASN; melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya.

3. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Tugas : Melaksanakan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang operasi dan pengamanan, dan pembinaan satuan perlindungan.
- Fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - b. Perumusan kebijakan teknis operasi dan pengamanan dan pembinaan satuan perlindungan Masyarakat;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis operasi dan pengamanan dan pembinaan satuan perlindungan Masyarakat;
 - d. Pengoordinasian pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan;
 - e. Pengoordinasian pelaksanaan patroli wilayah;
 - f. Pengoordinasian pengamanan asset-asset Pemerintah Daerah;
 - g. Pengoordinasian pengamanan dan pengawalan kegiatan Walikota, Wakil Walikota dan tamu pemerintah daerah;
 - h. Pengoordinasian kegiatan pemerintah daerah;
 - i. Pengoordinasian lokasi kunjungan kerja dan tamu pemerintah daerah;
 - j. Pengoordinasian penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - k. Pengoordinasian pelaksanaan operasi penertiban di lapangan dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - l. Pengoordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat tingkat kota;
 - m. Pengoordinasian peningkatan kapasitas sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia;
 - n. Pengoordinasian pemberdayaan perlindungan Masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum;

- o. Pengoordinasian kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- p. Pengoordinasian pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum;
- q. Pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat;
- r. Pengoordinasian penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- s. Pengoordinasian penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- t. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- u. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, membawahi :

- a. Seksi Operasi dan Pengamanan.

Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, dan melaksanakan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pengamanan meliputi : menyiapkan bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Operasi dan Pengamanan; menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasi dan pengamanan; menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis operasi dan pengamanan; menyiapkan kegiatan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan; menyiapkan kegiatan patroli wilayah; menyiapkan pengamanan aset-aset pemerintah daerah ; menyiapkan kegiatan pengamanan dan pengawalan Wali kota, wakil Wali Kota dan tamu pemerintah daerah; menyiapkan kegiatan pemerintah daerah; menyiapkan lokasi kunjungan kerja dan tamu pemerintah daerah; menyiapkan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kota; menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja

dan anggaran Seksi Operasi dan Pengamanan; melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya.

b. Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat

Tugas : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan satuan perlindungan masyarakat, meliputi : menyiapkan bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan, dan anggaran Seksi Pembinaan Satlinmas; menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan Satlinmas; menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan Satlinmas; menyiapkan bahan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM; menyiapkan kegiatan pemberdayaan Linmas dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum; menyiapkan kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan trantibum; menyiapkan bahan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum; menyiapkan bahan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; menyiapkan penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakkan Perda dan Perkada ; menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran Seksi Pembinaan Satlinmas; melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya.

Bidang Penegakkan Perundang – undangan Daerah

- Tugas: Melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pengawasan dan Pembinaan, serta penindakan.

Fungsi :

- a. Penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Bidang Penegakkan Perundang-undangan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pembinaan serta penindakan ;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pembinaan serta penindakan ;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;

- e. Pengoordinasian pengawasan pelaksanaan peraturan Perundang-undangan Daerah;
- f. Pengoordinasian penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota;
- g. Pengoordinasian pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota bersama dengan instansi terkait;
- h. Pengoordinasian penanganan proses penyelesaian pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota;
- i. Pengoordinasian penyediaan layanan dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- j. Pengoordinasian penyimpanan dan/atau pemusnahan barang hasil operasi;
- k. Pengoordinasian penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Wali Kota;
- l. Pengoordinasian pemeriksaan dan melakukan tindakan represif non yustisial terhadap masyarakat dan badan hukum yang melakukan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Wali Kota;
- m. Pengoordinasian penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- n. Pengoordinasian pengembangan kapasitas dan karier Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- o. Pengoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam upaya penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota;
- p. Pengoordinasian penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- q. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi :

- a. Seksi Penindakan

Tugas : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang penindakan. Meliputi : menyiapkan bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan, dan anggaran seksi penindakan; menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penindakan; menyiapkan bahan

pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis penindakan; menyiapkan penyelidikan dan penyidikan

b. Seksi Pengawasan dan Pembinaan

Tugas : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengawasan dan pembinaan, meliputi : pengawasan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Daerah, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan walikota bersama dengan Instansi terkait, penanganan proses penyelesaian pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota, penyimpanan dan/atau pemusnahan barang hasil operasi.

4. Bidang Penyelamatan dan Pencegahan Kebakaran

- Tugas : Perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran, meliputi : penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan kebakaran, pelatihan personil dan kemitraan penanggulangan serta pencegahan kebakaran, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

- Fungsi :

- a. Penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran;
 - b. Pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan kebakaran;
 - c. Pelatihan personil dan kemitraan penanggulangan serta pencegahan kebakaran;
 - d. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - e. Investigasi kejadian kebakaran;
 - f. Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- a. Seksi Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi

Tugas : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran, meliputi : penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan kebakaran, pelatihan personil dan kemitraan penanggulangan serta pencegahan kebakaran, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal Tahun 2026 adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 5) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
- 8) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025.
- 9) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031.
- 10) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024;

- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 14) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 15) Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.
- 16) Peraturan Daerah kota Tegal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Tegal.
- 17) Peraturan Walikota Tegal Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

1.3. Maksud dan Tujuan

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang sangat penting, menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk mendukung pencapaian visi misi Daerah. Secara makro maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja ini adalah sebagai berikut :

Maksud : Memberikan arahan dan pedoman terhadap pelaksanaan pembangunan daerah dalam waktu satu tahun yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas.

Tujuan :

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tegal Tahun 2026;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, dan antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja ini disusun dengan sistematika sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun $n-2$) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun $n-1$), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan / atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika perangkat daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan ;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan RKPD , misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun Perangkat Daerah kabupaten/ kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/ kota (bila sudah disahkan).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Perangkat Daerah, baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif, maupun kondisi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan.
- b. Kaidah kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2. 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Kota Tegal Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satpol PP Kota Tegal

Penyusunan Renja Satpol PP Kota Tegal Tahun 2026, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas yang akan dilaksanakan;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal Tahun 2026 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai *entry point* dalam penyusunan perencanaan tahun 2026 ;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Tahun 2024 Satpol PP Kota Tegal mengelola anggaran sebesar Rp. 16.004.262.045,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 15.443.721.660,- (96,50%). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program.

Secara umum, realisasi kinerja SATPOL PP Kota Tegal untuk tahun 2024 masing-masing program adalah sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp. 3.923.413.600,- realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 3.788.158.800,- atau sebesar 96,55% dan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%.

- 2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan anggaran sebesar Rp. 122.947.500,- realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 121.435.850,- atau sebesar 98,77% dan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%.
- 3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 11.957.900.945,- realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 11.534.127.010,- atau sebesar 96,46%.

Realisasi fisik/kinerja Satpol PP Kota Tegal untuk tahun 2024 untuk masing-masing program adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP sampai dengan Tahun 2024

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / SubKegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja Pada Trhwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
1.05.0	Satuan Polisi Pamong Praja				0				16.004.262.04		2.840.613.973		8.244.149.958		11.928.340.871		15.443.721.661		15.443.721.661	100,00	97,73				
1.1	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Perundang - Undangan Daerah				0				16.004.262.04		2.840.613.973		8.244.149.958		11.928.340.871		15.443.721.661		15.443.721.661	100,00	97,73				
1.05.0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0				11.957.900.94		2.675.270.973		5.567.627.458		8.668.748.375		11.534.127.011		11.534.127.011	100,00	97,81				
			Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah (%)	100		100		100		25		50		75		100		100		100,00		100			
			Persentase Capaian Pelayanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah (%)	100		100		100		25		50		75		100		100		100,00		100			
			Persentase Capaian Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah (%)	100		100		100		25		50		75		100		100		100,00		100			
1.05.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0				3.000.000		0		1.000.000		2.000.000		3.000.000		3.000.000	100,00	100,00				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	0	1	0	1	500.000	0	0	1	0	1	500.000	1	500.000	1	500.000	100,00	100,00				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	0	1	0	1	500.000	1	0	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	100,00	100,00				

I
a
m
a
t
a
n
d
a
n
p
e
n
c
e
g
a
h
a
n
K
e
b
a
k
a
r
a
n
K
a
b
i
d
.
K
e
t

e
n
t
r
a
m
a
n
d
a
n
K
e
t
e
r
t
i
b
a
n
U
m
u
m

1.

2.

1.

2.

1.

2.

K
a
s
u
b
a
g
·
U
m
u
m
d
a
n
K
e
p
e
g
a
w
a
i
a
n

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	0	3	0	3	500.000	1	0	1	0	2	500.000	3	500.000	3	500.000	100,00	100,00				
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	0	1	0	1	500.000	0	0	0	0	0	0	1	500.000	1	500.000	100,00	100,00				
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	0	1	0	1	500.000	1	0	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	100,00	100,00				
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	0	1	0	1	500.000	1	0	1	0	1	0	1	500.000	1	500.000	100,00	100,00				
1.05.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			0				6.738.413.295		1.410.831.461		3.527.468.075		5.180.247.618		6.617.009.686		6.617.009.686	100,00	98,76				
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	0	12	0	12	48.300.000	3	12.075.000	6	24.150.000	9	36.225.000	12	47.975.000	12	47.975.000	100,00	99,33				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50	0	44	0	50	6.690.113.295	50	1.398.756.461	50	3.503.318.075	50	5.144.022.618	50	6.569.034.686	50	6.569.034.686	100,00	98,19				
1.05.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0				3.300.000		825.000		1.650.000		2.475.000		3.300.000		3.300.000	100,00	100,00				
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	0	12	0	12	3.300.000	3	825.000	6	1.650.000	9	2.475.000	12	3.300.000	12	3.300.000	100,00	100,00				
1.05.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0				392.228.100		209.820.000		209.820.000		209.820.000		377.360.000		377.360.000	100,00	96,21				
		Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	210	0	99	0	210	392.228.100	140	209.820.000	140	209.820.000	140	209.820.000	210	377.360.000	210	377.360.000	100,00	96,21				
1.05.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah			0				352.964.550		94.739.600		117.434.100		220.920.940		346.153.590		346.153.590	100,00	96,56				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1200	0	1300	0	1200	18.000.000	260	2.175.000	270	4.200.000	658	9.030.000	1200	16.185.000	1200	16.185.000	100,00	89,92				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	29	0	29	0	29	31.362.600	7	7.465.900	20	14.898.800	23	22.331.700	29	30.705.400	29	30.705.400	100,00	97,90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	250	0	200	0	250	250.000.000	105	73.485.300	140	73.855.300	150	149.775.240	250	247.305.690	250	247.305.690	100,00	98,92				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	0	6	0	6	10.764.600	2	1.992.000	3	4.698.800	5	7.564.600	6	10.654.500	6	10.654.500	100,00	98,98				
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6	0	6	0	6	32.837.350	2	6.290.000	4	14.795.000	5	24.225.000	6	31.545.000	6	31.545.000	100,00	96,06				
1.05.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0				4.008.876.000		898.366.406		1.555.781.215		2.785.807.570		3.761.540.032		3.761.540.032	100,00	96,33				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	0	12	0	12	3.923.628.000	4	877.498.490	6	1.516.575.966	9	2.725.363.177	12	3.677.197.721	12	3.677.197.721	100,00	93,72				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	0	12	0	12	85.248.000	4	20.867.916	6	39.205.249	10	60.444.393	12	84.342.311	12	84.342.311	100,00	98,94				
1.05.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0				459.119.000		60.688.506		154.474.068		267.477.047		425.763.702		425.763.702	100,00	96,08				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	27	0	27	0	27	18.800.000	7	1.830.000	17	6.530.000	21	12.455.000	27	18.620.000	27	18.620.000	100,00	99,04				
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2	0	2	0	2	57.609.000	0	0	1	12.607.090	2	12.607.090	2	56.157.095	2	56.157.095	100,00	97,48				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya (Unit)	29	0	29	0	29	382.710.000	9	58.858.506	21	135.336.978	22	242.414.957	29	350.986.607	29	350.986.607	100,00	91,71				
1.05.0		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			0				3.923.413.600		152.160.000		2.642.539.500		3.210.849.500		3.788.158.800		3.788.158.800	100,00	97,46				
			Persentase Gangguan ketertiban Umum yang Tertangani (%)	90		90		90		22		42		67		100		100		111,11		100			
			Persentase Penanganan Pelanggaran Perundangundangan Daerah (%)	95,4		95,4		95,4		24		49		71		100		100		104,82		100			
			Rasio Linmas tertatih (%)	40		35		40		0		10		30		40,35		40,35		100,88		40,35			

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		
1.05.0		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			0				3.596.593.000		146.760.000		2.616.923.000		3.060.393.000		3.493.768.000		3.493.768.000	100,00	98,69					
		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	4	0	8	0	4	86.000.000	0	4.400.000	0	16.000.000	3	64.000.000	4	86.000.000	4	86.000.000	100,00	100,00					
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1	0	1	0	1	26.430.000	0	4.200.000	1	4.200.000	1	19.080.000	1	26.430.000	1	26.430.000	100,00	100,00					
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	0	1	0	1	3.110.903.000	1	96.400.000	1	2.427.223.000	1	2.739.623.000	1	3.012.128.000	1	3.012.128.000	100,00	96,82					
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	5	0	4	0	5	119.700.000	3	0	3	63.900.000	3	68.250.000	5	115.650.000	5	115.650.000	100,00	96,62					
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Diogah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)	12	0	12	0	12	253.560.000	3	41.760.000	3	105.600.000	9	169.440.000	12	253.560.000	12	253.560.000	100,00	100,00					
1.05.0		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			0				326.820.600		5.400.000		25.616.500		150.456.500		294.390.800		294.390.800	100,00	94,37					

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1	0	1	0	1	6.219.500	1	0	1	6.147.500	1	6.147.500	1	6.147.500	1	6.147.500	100,00	98,84				
		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	10	0	8	0	10	320.601.100	0	5.400.000	0	19.469.000	8	144.309.000	10	288.243.300	10	288.243.300	100,00	89,91				
1.05.0		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			0				122.947.500		13.183.000		33.983.000		48.743.000		121.435.850		121.435.850	100,00	97,92				
		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (%)		100		100		100		100		100		100		100		100		100,00		100			
1.05.0		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota			0				111.568.300		2.160.000		22.960.000		37.720.000		110.412.850		110.412.850	100,00	98,96				
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Laporan)	120	0	76	0	120	111.568.300	18	2.160.000	29	22.960.000	55	37.720.000	120	110.412.850	120	110.412.850	100,00	98,96				
1.05.0		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			0				11.379.200		11.023.000		11.023.000		11.023.000		11.023.000		11.023.000	100,00	96,87				
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	50	0	50	0	50	11.379.200	50	11.023.000	50	11.023.000	50	11.023.000	50	11.023.000	50	11.023.000	100,00	96,87				
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100,00					
Predikat kinerja																				Sangat Tinggi					
Keterangan		Skor (%)																							
Sangat Rendah		0 s/d <= 50																							
Rendah		50.01 s/d <= 65																							
Sedang		65.01 s/d <= 75																							

2. 2 Analisis Kinerja Pelayanan Daerah

Indikator kinerja Satpol PP Kota Tegal yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Satpol PP Kota Tegal.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Dengan Indikator Kinerja Utama dapat diukur kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas secara kualitatif dari keberhasilan Perangkat Daerah.

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Satpol PP berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan melalui IKU Kota Tegal disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai mana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.2
ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN
TAHUN 2024

No	Indikator	Target Renstra SKPD Tahun 2024	Realisasi Renstra SKPD Tahun 2024	Kategori
1	Presentase berkurangnya gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	10%	9,75%	Sangat Baik
2	Tingkat Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	Sangat Baik

Tabel 2.2.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026
1	Presentase berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat	10%
2	Tingkat Kepatuhan terhadap Perundang-undangan Daerah	100%
3	Tingkat Waktu Tanggap Respon (Time Response Rate) Daerah Layanan Manajemen Kebakaran	100%

Rata-rata capaian dari 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu sebesar **101,25%** dengan kategori **“Sangat Baik”**

2. 3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

2. 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam perumusan isu-isu penting dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Tegal, konteks perumusan isu strategis Satpol PP Kota Tegal akan meliputi beberapa runtutan kegiatan diantaranya adalah identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaah Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, telaah terhadap dokumen Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sampai dengan tujuan akhir didalam konteks laporan adalah melakukan Penentuan isu-isu Strategis Satpol PP Kota Tegal.

2.3.2 Secara umum beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Tegal dalam pelaksanaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum antara lain :

- a. Standar SDM masih banyak yang belum memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang masih sangat terbatas;
- c. Jumlah personil yang belum memadai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Sarana dan prasarana yang kurang memadai;
- e. Masih rendahnya ketaatan sebagian masyarakat dalam melaksanakan Peraturan Daerah;
- f. Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. Regulasi yang tidak mendukung dalam proses penegakkan Peraturan Daerah;
- h. Sikap dan perilaku sebagian masyarakat yang cenderung ingin bebas tanpa batas sehingga mengabaikan aturan.

2.3.3 Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan.

Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah

akan dapat mempertahankan/ meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kejadian/ kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Secara teknokratis, penentuan sesuatu atau kondisi menjadi isu strategis dapat didukung dengan menerbitkan pedoman atau kriteria oleh kepala daerah atau kepala Satpol PP.

Isu-isu strategis yang menjadi perhatian dan tanggung jawab khusus dari Satpol PP dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum yaitu:

- 1) Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota belum optimal;
- 2) Meningkatkan Rasio Petugas Linmas Terlatih.

2. 4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Program dan kegiatan yang direncanakan dalam dokumen Renja SATPOL PP Kota Tegal merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra SATPOL PP Kota Tegal tahun 2025 - 2026, yang menjadi bahan dalam penyusunan Rancangan Renja SATPOL PP Kota Tegal Tahun 2026.

Perkembangan situasi dan kondisi di masyarakat bersifat dinamis, dan seiring dengan berjalanya proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, memungkinkan terjadinya suatu kegiatan yang diakomodir pada Renstra Bapperida, namun belum terakomodir pada Rancangan Renja Bapperida Tahun 2026 ataupun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun 2026.

TABEL 2.4.1

REVIEW TERHADAP RANCANGAN RENCANA KERJA BAPPERIDA KOTA TEGAL TAHUN 2026

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.306.363.626,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.306.363.626,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				9.306.363.626,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				9.306.363.626,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Tingkat Kematangan Organisasi	100%	8.112.295.926,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Tingkat Kematangan Organisasi	100%	8.112.295.926,00	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	3.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	3.000.000,00	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	500.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	500.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	500.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	500.000,00	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	500.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	500.000,00	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	500.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	500.000,00	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.652.558.887,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.652.558.887,00	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	6.604.258.887,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	6.604.258.887,00	
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	48.300.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	48.300.000	
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Presentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		3.300.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Presentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		3.300.000,00	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	3.300.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	3.300.000,00	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		105.759.500,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	210 Paket	105.759.500,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	210 Paket	105.759.500,00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		306.078.650,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		306.078.650,00	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	10.764.600,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	10.764.600,00	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket,	32.973.200,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket	32.973.200,00	
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket,	10.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket,	10.000.000,00	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Tegal, Semua Kecamatan,	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1300 Paket,	19.500.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1300 Paket,	19.500.000,00	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Semua Kelurahan					Kelurahan				
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket,	32.840.850,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket,	32.840.850,00	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200.000.000,00	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				213.131.697,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		213.131.697,00	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.01.2.07.0006				5 Unit	213.131.697,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	213.131.697,00	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		276.957.192,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		276.957.192,00	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	85.248.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	85.248.000,00	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	191.709.192,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	191.709.192,00	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	551.510.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	551.510.000,00	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	382.710.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	382.710.000,00	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	18.800.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	18.800.000,00	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	150.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	150.000.000,00	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kelurahan									
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Gangguan Ketertiban Umum yang Tertangani	100%	777.487.500,00	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Gangguan Ketertiban Umum yang Tertangani	100%	777.487.500,00	
			Persentase Penanganan Pelanggaran Perundangundangan Daerah	100%				Persentase Penanganan Pelanggaran Perundangundangan Daerah	100%		
			Jumlah Linmas Terlatih	100 Orang				Jumlah Linmas Terlatih	100 Orang		
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	674.267.000,00	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	674.267.000,00	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	267.096.000,00	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	267.096.000,00	
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	8 Laporan	57.000.000,00	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	umlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	8 Laporan	57.000.000,00	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	7.040.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	7.040.000,00	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	26.431.000,00	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	26.431.000,00	
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 Dokumen	116.700.000,00	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 Dokumen	116.700.000,00	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional			100 Orang	200.000.000,00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	100 Orang	200.000.000,00	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Persentase pelaksanaan penegakan perda dan perwal		103.220.500,00	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Persentase pelaksanaan penegakan perda dan perwal		103.220.500,00	
1.05.02.2.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	1 Laporan	6.220.500,00	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	1 Laporan	6.220.500,00	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.02.2.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	10 Laporan	97.000.000,00	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	10 Laporan	97.000.000,00	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Presentase Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Managemen Kebakaran	100%	416.580.200,00	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Managemen Kebakaran	100%	416.580.200,00	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	205.200.000,00	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Managemen Kebakaran	100%	205.200.000,00	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	120 Laporan	55.200.000,00	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	120 Laporan	55.200.000,00	
1.05.04.2.01.17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		150.000.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Presentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Presentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		211.380.200,00	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulanga n Kebakaran Setiap Tahunnya	50 Orang		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	50 Orang	11.380.200,00	
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran			27 Desa/Kelurahan	200.000.000,00	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran	27 Desa/Kelurahan	200.000.000,00	
JUMLAH					9.306.363.626,00	JUMLAH					

2. 1 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui pelaksanaan Musrenbang diperoleh berbagai usulan kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana pembangunan tingkat kota. Melalui forum ini akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat. Secara umum, semua kebutuhan masyarakat yang tertampung pada hasil Musrenbang maupun melalui Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pokir DPRD) telah terealisasi berdasarkan skala prioritas dan sudah diakomodir dalam Rencana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal. Namun karena usulan yang masuk jumlahnya terlalu banyak bila dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah, maka usulan yang diakomodir di dalam Renja sudah melalui penelaahan berdasarkan skala prioritas.

**Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Kota
Tegal
(Hasil Musrenbang)**

PD : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			NIHIL		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional / Provinsi

Prioritas utama Jawa Tengah dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan meliputi kapabilitas, integritas, akuntabilitas, ketaatan pada hukum, kredibilitas dan transparansi. Langkah utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas di Kota Semarang dilakukan melalui penciptaan struktur pemerintah yang efisien, peningkatan kapasitas aparatur dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas data. Ketaatan hukum yang dimaksud adalah kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada serta ikut berpartisipasi terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban melalui peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban dengan didukung ketersediaan dan kualitas data.

Dari hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1 Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan serta ikut menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum;
- 2 Penanganan pengaduan masyarakat pelanggaran Peraturan Daerah secara cepat, komprehensif dan tuntas;
- 3 Peningkatan cakupan wilayah kawasan tertib sampai wilayah terpencil;
- 4 Peningkatan jumlah Linmas terlatih melalui pemberdayaan dan juga fasilitas ketrampilan Linmas;
- 5 Peningkatan koordinasi aparat penegak hukum di Jawa Tengah.

Berdasarkan telaahan dari Renstra K/L maupun dari Renstra Satpol PP, maka terdapat keterkaitan antara Isu strategis dari Satpol PP pusat maupun provinsi dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal, yaitu :

- a. Perumusan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
- d. Pelaksanaan kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal sebagaimana tertuang dalam Renstra Satpol adalah **Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintah daerah**. Sementara itu Sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Kepatuhan terhadap Perundang - Undangan Daerah.
- 2) Optimalnya Pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan evakuasi.

3.3 Program dan Kegiatan

Bahwa nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Tegal mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum pada BAB IV.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Kota Tegal Tahun 2026 memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Satpol PP Kota Tegal Tahun 2025-2026 dan RKPD 2026, sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan diarahkan untuk mendukung capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Renja Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tegal dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2026 antara lain terdiri dari 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan. Secara lengkap Rencana Kerja dan Pendanaan Satpol PP Kota Tegal yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

TABEL 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPERIDA KOTA TEGAL
TAHUN 2026

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.306.363.626,00				9.397.844.739,00
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				9.306.363.626,00				9.397.844.739,00
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				8.112.295.926,00				8.203.777.039,00
1	05	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.000.000,00				3.600.000,00
1	05	001	2	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 dokumen	500.000,00	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		4 dokumen	600.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	001	2	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	500.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 dokumen	600.000,00
1	05	001	2	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	500.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 dokumen	600.000,00
1	05	001	2	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	500.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 dokumen	600.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	001	2	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Tegal, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	1 dokumen	500.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		1 dokumen	600.000,00
1	05	001	2	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tegal, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	2 Laporan	500.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		2 Laporan	600.000,00
1	05	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.652.558.887,00				6.748.300.000,00
1	05	001	2	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tegal, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	48 Orang/Bulan	6.604.258.887,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		48 Orang/Bulan	6.700.000.000,00
1	05	001	2	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Tegal, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	12 Dokumen	48.300.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	48.300.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	001	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.300.000,00				3.300.000,00
1	05	001	2	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	3.300.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 Laporan	3.300.000,00
1	05	001	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				105.759.500,00				105.759.500,00
1	05	001	2.1	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Paket	105.759.500,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100 Paket	105.759.500,00
1	05	001	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah				306.078.650,00				306.078.650,00
1	05	001	2.1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Paket	10.764.600,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6 Paket	10.764.600,00
1	05	001	2.1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29 Paket	32.973.200,00	Dana Transfer Umum - Dana		29 Paket	32.973.200,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
										Alokasi Umum			
1	05	001	2.1	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Tegal, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	12 Paket	10.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		12 Paket	10.000.000,00
1	05	001	2.1	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Tegal, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	1300 Paket	19.500.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		1300 Paket	19.500.000,00
1	05	001	2.1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Tegal, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	6 Paket	32.840.850,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		6 Paket	32.840.850,00
1	05	001	2.1	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tegal, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	200 Laporan	200.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		12 Laporan	200.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				213.131.697,00				213.131.697,00
1	05	01	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	213.131.697,00				213.131.697,00
1	05	001	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				276.957.192,00				272.097.192,00
1	05	001	2.1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	85.248.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		12 Laporan	85.248.000,00
1	05	001	2.1	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	191.709.192,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		12 Laporan	186.849.192,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	001	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				551.510.000,00				551.510.000,00
1	05	001	2.1	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29 Unit	382.710.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		29 Unit	
1	05	001	2.1	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27 Unit	18.800.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		27 Unit	18.800.000,00
1	05	001	2.1	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	150.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		2 Unit	150.000.000,00
1	05	002			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				777.487.500,00				777.487.500,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	002	2		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				674.267.000,00				674.267.000,00
1	05	002	2	001	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Kasus	267.096.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		12 Kasus	267.096.000,00
1	05	002	2	002	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	57.000.000,00 Kota Tegal,	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		4 Laporan	57.000.000,00 Kota Tegal,

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	002	2	003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Kota Tegal, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	1 Dokumen	7.040.000,00	Dana Transfer Umum –Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	7.040.000,00
1	05	002	2	004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Tegal, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	1 Dokumen	26.431.000,00	Dana Transfer Umum –Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	26.431.000,00
1	05	002	2	006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kota Tegal, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	4 Dokumen	116.700.000,00	Dana Transfer Umum –Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	116.700.000,00
1	05	002	2	010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Kota Tegal, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 Orang	200.000.000,00	Dana Transfer Umum –Dana Alokasi Umum		100 Orang	200.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	002	2		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				103.220.500,00				103.220.500,00
1	05	002	2	001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	6.220.500,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		1 Laporan	6.220.500,00
1	05	002	2	003	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	97.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		2 Laporan	97.000.000,00
1	05	004			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				416.580.200,00				416.580.200,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	004	2		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				205.200.000,00				205.200.000,00
1	05	004	2	002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Laporan	55.200.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100 Laporan	55.200.000,00
1	05	004	2	017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	150.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5 Unit	150.000.000,00
1	05	004	2		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				211.380.200,00				211.380.200,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	004	2	001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	11.380.200,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		50 Orang	11.380.200,00
1	05	004	2	007	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran	Kota Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27 Desa/Kelurahan	200.000.000,00			27 Desa/Kelurahan	200.000.000,00
TOTAL							9.306.363.626,00					9.397.844.739,00	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rancangan Rencana Kerja (Ranwal Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal Tahun 2026, penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005–2025, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2025–2026, dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal Tahun 2025-2026.

Renja (Rencana Kerja) Satpol PP merupakan rencana kerja tahunan yang memuat strategi, arah kebijakan, program kegiatan dan pendanaan indikatif. Renja tahun 2026 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal.

Harapan kami di tahun 2026 kondisi sosial, ekonomi, politik dan kebijakan pemerintah, (baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi) tidak berbeda jauh dengan kondisi yang sudah kita proyeksikan dalam penyusunan perencanaan ini, sehingga target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan ini dapat tercapai secara optimal.

Ditetapkan di: Tegal

Pada Tanggal: 14 Maret 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA TEGAL



HARTOTO, S.IPem, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19690115 199009 1 001

